



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dapat memberikan peran dan sumbangan yang berarti bagi pembiayaan pengeluaran negara.

Dalam mencapai tujuan utama pembangunan ekonomi, pemerintah harus meningkatkan pendapatan nasional. Kemampuan menggali dana baik domestik maupun luar negeri dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang perlu terus ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan upaya mewujudkan kemandirian pembiayaan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak. Menurut Prof. Dr. A Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (UU) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Salah satu fungsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak adalah fungsi budgetair atau fungsi pembiayaan yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Oleh karena itu peran aktif wajib pajak dalam pembayaran pajak sangat diharapkan dengan peran aktif ini berarti wajib pajak telah berkontribusi dalam upaya kemandirian pembiayaan pembangunan. Selain itu, pajak juga memberikan sumbangan yang sangat besar bagi APBN. Untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, maka perlu dilakukan upaya nyata dari pihak terkait dalam pelaksanaannya. Menganut sistem *self assesment*, yaitu wajib pajak menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Sistem pajak penghasilan di Indonesia mengenal sistem pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan (*withholding tax*). Pemotongan atau pemungutan PPh ini sebagai bagian dari pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Sifatnya biasanya merupakan pembayaran di muka atas PPh yang akan terutang serta dilunasi melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Salah satu penerimaan pajak penghasilan dari impor barang, dimana impor barang merupakan salah satu kegiatan yang dijadikan objek pengenaan atau pemungutan PPh pasal 22, sesuai dengan ketentuan pasal 22 UU PPh dan peraturan menteri keuangan (PMK) NOMOR 154/PMK.03/2010. Dalam hal ini yang dimaksud dengan impor setiap kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri, baik dilakukan secara legal atau pun tidak. Pajak penghasilan pasal 22 dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyerahan barang dengan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Pajak penghasilan pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak-pihak tertentu.

Sebenarnya terdapat kemungkinan juga bahwa wajib pajak dalam satu tahun pajak tidak akan terhutang pajak penghasilan karena bebrapa sebab apabila terhadap wajib pajak seperti ini dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh, maka yang terjadi adalah wajib pajak harus membayar pajak yang sebenarnya tidak terhutang. Walaupun nantinya pph yang dibayar ini akan dikembalikan melalui mekanisme restitusi, namun tentu saja wajib pajak akan dirugikan dari sisi arus kas (*cash flow*) perusahaan.

Atas dasar pemikiran itulah tampaknya ada ketentuan tentang surat keterangan bebas pemotongan dan atau pemungutan PPh 22 impor sehingga Wajib Pajak tidak dirugikan secara *cash flow* seperti dijelaskan di atas. Ketentuan dimaksud adalah Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor FER-I/PJ/2011 tentang tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan 22 impor oleh pihak lain. Peraturan Dirjen Pajak ini menggantikan keputusan Dirjen Pajak NOMOR KEF-192/PJ/2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan. Dengan adanya SKB ini maka pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 ini dibebaskan dari pemotongan atau Pungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Keterangan bebas (SKB) PPh pasal 22 impor adalah surat yang menyatakan wajib pajak dibebaskan dari Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dalam rangka impor yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar di dalam pengenaan PPh pasal 22 impor ini memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari kepala KPP tempat importir atau pihak yang akan melakukan impor terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak atau dari Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai setempat. Sebelum mendapatkan surat bebas tersebut Wajib Pajak harus membuat surat permohonan keterangan surat permohonan keterangan bebas PPh pasal 22 impor. Persyaratan permohonan ini wajib bagi para Wajib Pajak untuk melengkapinya sebab tanpa persyaratan yang lengkap surat keterangan bebas tidak bisa dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pratama Pekanbaru siap melayani wajib pajak yang ingin membuat pembebasan dari pemungutan PPh 22 impor tersebut, akan tetapi kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru adalah masih adanya wajib pajak yang tidak memahami tata cara penyelesaian permohonan surat keterangan bebas PPh 22 impor, serta sistem komputerisasi yang kadang kala sering *error system* dan persyaratan permohonan bebas PPh pasal 22 impor ini sering tidak dilengkapi oleh para wajib pajak. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Bangkinang adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1

Jumlah Wajib Pajak Tahun 2013 s/d 2015 di KPP Bangkinang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2013	250.627
2014	249.909
2015	245.042

Maka dari itu diharapkan Wajib Pajak dapat lebih memahami mengenai Surat Keterangan Bebas (SKB), oleh karenanya penyuluhan dan pengawasan sangat diperlukan agar jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tata cara penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor di kantor pelayanan pajak Pratama Bangkinang. Dari uraian diatas maka ruang lingkung yang akan penulis bahas yaitu :

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPH 22 IMPOR DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas dan melihat permasalahan yang ada pada kantor pelayanan pajak Pratama Bangkinang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
“Bagaimana tata cara penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 22 Impor di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelesaian permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh pasal 22 impor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
2. Hambatan yang terjadi dalam prosedur penyelesaian permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh pasal 22 impor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

2. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai zakat dan pajak serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Metode Penulisan

1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di Pekanbaru Riau

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2016 sampai selesai.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

b. Data Sekunder

Merupakan keterangan-keterangan yang mendukung data primer, data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan cara melalui media perantara seperti aturan-aturan hukum tentang pajak dan zakat, catatan, dokumen, maupun bentuk lainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Mencari data atau informasi mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang bisa dijadikan dasar untuk menanggapi masalah yang dikaji.

b. Wawancara yang ditujukan kepada informan yakni pegawai Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bangkinang di Pekanbaru Propinsi Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Analisis Data

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BANGKINANG

Dalam Bab ini Penulis Menguraikan Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, Tentang Sejarah Singkat, Struktur Organisasi Unit Kerja Dan Uraian Tugas Pokok.

BAB III : Tinjauan Teori Dan Praktek

Bab ini berisikan pembahasan pengertian PPh pasal 22, pemungutan pajak PPh pasal 22, kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22, kegiatan yang tidak dikenakan pasal 22, saat terutang PPh pasal 22, tata cara pemungutan dan penyetoran pasal 22 impor, sifat pemungutan PPh pasal 22 impor, dasar dan tarif PPh pasal 22 impor, perhitungan pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22 impor, prosedur kegiatan impor, pajak menurut sariah, pengertian Surat Keterangan Bebas atau (SKB), Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan, keputusan dan masa berlaku Surat Keterangan Bebas (SKB), serta tata cara penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22 impor.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA